

MASA DEPAN KAPITALISME DAN TUNTUTAN KEADILAN

Perspektif Stiglitz, Polanyi, dan Mazzucato

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Ide Pokok

Kapitalisme masa depan tidak cukup diukur dari pertumbuhan, tetapi dari kemampuannya menciptakan kemakmuran yang adil, inovasi yang produktif, perlindungan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

A. Joseph E. Stiglitz



- Ketimpangan bukan gejala alamiah, tetapi hasil dari *rules of the game*.
- Masalah utama: monopoli, *rent-seeking*, ketimpangan kesempatan, dan pelemahan demokrasi.
- Pasar perlu diatur agar kompetitif, inklusif, dan tidak dikuasai elite.
- Keadilan memperkuat pertumbuhan, stabilitas, dan legitimasi ekonomi.

B. Karl Polanyi



- Pasar tidak boleh tercerabut dari masyarakat.
- Tenaga kerja, tanah, dan uang adalah komoditas fiktif.
- Ekspansi pasar bebas memicu gerakan balik untuk perlindungan sosial.
- Ekonomi harus tertanam kembali dalam nilai sosial dan ekologi.

C. Mariana Mazzucato



- Negara bukan hanya memperbaiki kegagalan pasar, tetapi membentuk pasar.
- Inovasi besar sering lahir dari investasi publik jangka panjang.
- Fokus pada *public value*, bukan sekadar *private profit*.
- Kebijakan berbasis misi diperlukan untuk energi, kesehatan, teknologi, dan industri hijau.

Titik Temu Tiga Perspektif



Pasar perlu aturan



Negara harus berkapasitas



Masyarakat harus dilindungi



Inovasi harus mencipta nilai publik



Keadilan adalah syarat keberlanjutan kapitalisme

MASALAH KAPITALISME KONTEMPORER



Ketimpangan pendapatan & kekayaan



Monopoli digital & kekuasaan data



Rent-seeking & oligarki



Krisis ekologis & ekstraktivisme



Kerentanan kerja & proteksi sosial lemah

ARAH KAPITALISME MASA DEPAN



Dari ekstraksi nilai → ke penciptaan nilai



Dari pertumbuhan semata → ke pertumbuhan inklusif



Dari deregulasi mutlak → ke tata kelola cerdas



Dari inovasi privat → ke inovasi berorientasi misi



Dari keuntungan sempit → ke kesejahteraan publik

AGENDA KEADILAN EKONOMI



- ✓ Pajak yang lebih adil dan progresif
- ✓ Perlindungan pekerja dan upah layak
- ✓ Akses pendidikan, kesehatan, dan teknologi
- ✓ Regulasi anti-monopoli dan tata kelola data
- ✓ Investasi publik pada riset, energi hijau, dan industri strategis
- ✓ Transisi ekologis yang berkeadilan

IMPLIKASI BAGI INDONESIA



- 1 Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nasional, bukan rente baru.
- 2 Transformasi digital harus melindungi UMKM, pekerja, dan data warga.
- 3 SDA perlu dikelola berkelanjutan dengan manfaat yang merata.
- 4 Negara perlu misi pembangunan yang jelas: pangan, energi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi.
- 5 Pembangunan harus menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Masa depan kapitalisme bergantung pada kemampuan menata ulang hubungan antara pasar, negara, masyarakat, dan alam. Kapitalisme yang adil bukan anti-pasar, melainkan pro-kemanusiaan, pro-inovasi, dan pro-kesejahteraan bersama.

*Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Kapitalisme dan Tuntutan
Keadilan: Perspektif Stiglitz, Polanyi, dan Mazzucato*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

25 Juni 2026

MASA DEPAN KAPITALISME DAN TUNTUTAN KEADILAN: PERSPEKTIF STIGLITZ, POLANYI, DAN MAZZUCATO

Abstrak

Artikel ini membahas masa depan kapitalisme melalui tiga perspektif teoritis yang saling melengkapi: Joseph E. Stiglitz, Karl Polanyi, dan Mariana Mazzucato. Ketiganya tidak menolak pasar sebagai mekanisme koordinasi ekonomi, tetapi menolak gagasan bahwa pasar dapat bekerja secara adil, stabil, dan produktif tanpa aturan sosial, institusi publik, dan orientasi moral. Stiglitz menekankan bahwa ketimpangan bukanlah akibat alamiah dari bakat atau produktivitas semata, melainkan hasil dari aturan ekonomi-politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan, rent-seeking, monopoli, pelemahan buruh, dan kooptasi demokrasi. Polanyi melihat kapitalisme pasar sebagai proyek historis yang berupaya melepaskan ekonomi dari ikatan sosial, terutama melalui komodifikasi tenaga kerja, tanah, dan uang sebagai "komoditas fiktif". Akibatnya, masyarakat melakukan gerakan balik untuk melindungi diri dari kerusakan sosial yang ditimbulkan pasar bebas. Mazzucato melangkah lebih jauh dengan mengusulkan negara kewirausahaan dan kebijakan inovasi berbasis misi, yakni negara yang tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar, tetapi ikut membentuk pasar, menciptakan nilai publik, dan memastikan pembagian risiko serta imbal hasil secara adil. Dengan mengintegrasikan ketiganya, artikel ini mengajukan tesis bahwa masa depan kapitalisme akan ditentukan oleh kemampuannya untuk bergerak dari kapitalisme ekstraktif menuju

kapitalisme berkeadilan, produktif, demokratis, ekologis, dan berbasis nilai publik. Dalam konteks Indonesia, tuntutan ini sangat relevan karena pembangunan menghadapi tantangan ketimpangan, hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, transisi energi, konsentrasi kepemilikan, dan kebutuhan memperkuat kapasitas negara.

Kata kunci: *kapitalisme, keadilan ekonomi, ketimpangan, negara kewirausahaan, pasar, Polanyi, Stiglitz, Mazzucato, komoditas fiktif, inovasi berbasis misi.*

1. Pendahuluan: Kapitalisme di Persimpangan Sejarah

Kapitalisme modern berada dalam fase yang paradoksal. Di satu sisi, ia telah menghasilkan ekspansi produktivitas, inovasi teknologi, kemajuan industri, pertumbuhan perdagangan global, dan penciptaan kekayaan dalam skala yang tidak pernah dikenal dalam sejarah manusia sebelumnya. Kapitalisme memungkinkan organisasi produksi menjadi lebih kompleks, memfasilitasi pertumbuhan perusahaan multinasional, mempercepat difusi teknologi digital, dan membuka ruang bagi mobilitas ekonomi sebagian kelompok masyarakat. Namun, di sisi lain, kapitalisme juga menciptakan ketimpangan yang tajam, krisis ekologis, konsentrasi kekuasaan korporasi, kerentanan buruh, komodifikasi kehidupan sosial, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Pertanyaan mendasar yang muncul bukan lagi sekadar apakah kapitalisme mampu menciptakan pertumbuhan, melainkan apakah pertumbuhan itu adil, berkelanjutan, demokratis, dan manusiawi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi disertai ketimpangan ekstrem dapat melahirkan masyarakat yang rapuh. Produktivitas yang meningkat tetapi tidak diterjemahkan menjadi upah layak dapat menimbulkan frustrasi sosial. Inovasi teknologi yang canggih tetapi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan dapat memperlemah kompetisi. Globalisasi yang memperluas

pasar tetapi menghancurkan basis kehidupan lokal dapat memicu gerakan populisme, proteksionisme, dan krisis legitimasi politik.

Data ketimpangan global memperlihatkan bahwa isu ini bukan sekadar perdebatan normatif. World Inequality Report 2022 melaporkan bahwa bagian bawah 50% populasi dunia hanya menerima sekitar 8% pendapatan global dan memiliki sekitar 2% kekayaan global, sementara 10% teratas menerima sekitar 52% pendapatan dan memiliki sekitar 76% kekayaan global. Angka ini menunjukkan bahwa kapitalisme kontemporer tidak hanya menghadapi persoalan produksi, tetapi juga persoalan distribusi, akses, dan kekuasaan. ([World Inequality Report 2022](#))

Dalam konteks inilah pemikiran Joseph E. Stiglitz, Karl Polanyi, dan Mariana Mazzucato menjadi sangat penting. Stiglitz membantu kita memahami bahwa ketimpangan merupakan produk dari aturan ekonomi-politik. Polanyi membantu kita membaca krisis kapitalisme sebagai akibat dari pasar yang tercerabut dari masyarakat. Mazzucato menawarkan jalan rekonstruksi melalui negara yang mampu membentuk pasar, mengarahkan inovasi, dan menciptakan nilai publik. Ketiga pemikir ini dapat ditempatkan dalam satu dialog besar mengenai masa depan kapitalisme: bagaimana pasar dapat dipertahankan sebagai mekanisme produktif tanpa membiarkan masyarakat dikorbankan oleh logika pasar semata.

Kapitalisme masa depan tidak dapat hanya dinilai dari efisiensi harga, pertumbuhan produk domestik bruto, atau besarnya investasi. Ia harus dinilai dari kemampuannya menyediakan kehidupan bermartabat, memperluas kesempatan, menjaga lingkungan, memperkuat demokrasi, dan membagi hasil kemajuan teknologi secara lebih adil. Dengan kata lain, kapitalisme masa depan membutuhkan pembaruan kontrak sosial.

2. Kapitalisme sebagai Sistem Ekonomi-Politik, Bukan Sekadar Mekanisme Pasar

Salah satu kekeliruan umum dalam memahami kapitalisme adalah melihatnya sebagai sistem alamiah yang tumbuh spontan dari kebebasan individu untuk bertukar barang dan jasa. Dalam pandangan ini, pasar seolah-olah merupakan ruang netral tempat pelaku ekonomi bertemu, harga terbentuk, dan efisiensi tercapai. Namun, Stiglitz, Polanyi, dan Mazzucato sama-sama menolak penyederhanaan tersebut. Kapitalisme bukan sekadar pasar. Kapitalisme adalah sistem ekonomi-politik yang dibentuk oleh hukum, institusi, norma sosial, teknologi, kepemilikan aset, kebijakan publik, dan relasi kekuasaan.

Pasar tidak pernah berdiri sendiri. Hak milik harus didefinisikan oleh negara. Kontrak harus ditegakkan oleh sistem hukum. Mata uang harus dijaga oleh otoritas moneter. Perusahaan harus diatur oleh regulasi. Buruh harus dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Lingkungan harus dijaga oleh kebijakan publik. Tanpa institusi-institusi tersebut, pasar tidak menjadi bebas, melainkan berubah menjadi arena dominasi pihak yang paling kuat.

Stiglitz berulang kali menegaskan bahwa ketimpangan adalah akibat dari "rules of the game". Dalam pandangannya, distribusi pendapatan dan kekayaan tidak hanya ditentukan oleh produktivitas individu, tetapi oleh aturan yang menentukan siapa memiliki akses terhadap pendidikan, kredit, perlindungan hukum, pasar tenaga kerja, pajak, kekayaan intelektual, dan kekuasaan politik. Buku *The Price of Inequality* menempatkan ketimpangan sebagai ancaman terhadap ekonomi dan demokrasi, sementara *Rewriting the Rules of the American Economy* mengusulkan perbaikan aturan agar pertumbuhan lebih inklusif. ([W.W. Norton & Company](#))

Polanyi melangkah lebih historis. Dalam *The Great Transformation*, ia menunjukkan bahwa ekonomi pasar modern bukanlah hasil evolusi alami, melainkan proyek politik besar yang menciptakan "masyarakat pasar". Buku tersebut pertama kali terbit pada 1944 dan edisi Beacon Press 2001 memuat pengantar Joseph Stiglitz serta pendahuluan Fred Block.

([INCT/PPED](#)) Bagi Polanyi, masalah utama bukanlah keberadaan pasar, melainkan ketika masyarakat dipaksa tunduk sepenuhnya pada pasar.

Ketika tenaga kerja, tanah, dan uang diperlakukan sebagai komoditas biasa, maka manusia, alam, dan stabilitas moneter dikorbankan demi mekanisme harga.

Mazzucato menambahkan dimensi inovasi. Ia menolak mitos bahwa sektor publik hanya lamban, birokratis, dan berfungsi memperbaiki kegagalan pasar. Dalam *The Entrepreneurial State* dan tulisan-tulisannya tentang mission-oriented innovation policy, Mazzucato menunjukkan bahwa negara sering memainkan peran penting dalam membiayai risiko awal, membentuk arah inovasi, dan menciptakan pasar baru. Artikel *The Entrepreneurial State* diterbitkan dalam *Soundings* dengan DOI 10.3898/136266211798411183, sedangkan artikel *Mission-oriented innovation policies* menekankan perlunya negara tidak hanya memperbaiki pasar, tetapi juga membentuk dan menciptakan pasar. ([Lawrence Wishart](#))

Dengan demikian, kapitalisme harus dipahami sebagai tatanan institusional. Jika aturan dibuat untuk melindungi kompetisi, memperkuat buruh, membatasi rente, mendorong inovasi produktif, dan menjamin redistribusi, maka kapitalisme dapat lebih inklusif. Namun jika aturan dibuat untuk memperkuat monopoli, melindungi kepentingan oligarki, melemahkan pajak progresif, dan membiarkan ekstraksi nilai, maka kapitalisme menjadi mesin ketimpangan.

3. Joseph Stiglitz: Ketimpangan sebagai Pilihan Politik dan Kegagalan Institusional

Joseph E. Stiglitz dikenal sebagai ekonom yang mengkritik pasar bebas ekstrem dari dalam tradisi ekonomi modern. Sebagai penerima Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, Stiglitz berangkat dari teori informasi asimetris. Ia menunjukkan bahwa pasar nyata tidak bekerja seperti model pasar sempurna dalam buku teks. Informasi tidak tersebar merata, kekuasaan tawar tidak seimbang, dan institusi memengaruhi hasil ekonomi.

Dalam kerangka Stiglitz, ketimpangan bukan hanya persoalan moral. Ketimpangan juga merupakan persoalan efisiensi. Pandangan lama sering menyatakan bahwa ketimpangan diperlukan untuk memberi insentif kepada inovator, investor, dan pekerja keras. Stiglitz tidak menolak bahwa insentif penting, tetapi ia menolak ketimpangan ekstrem yang lahir dari rente, monopoli, spekulasi, dan manipulasi aturan. Dalam artikelnya *Inequality and Economic Growth*, Stiglitz berargumen bahwa ketimpangan berlebihan tidak baik bagi pertumbuhan; sebaliknya, ia dapat melemahkan kinerja ekonomi melalui rendahnya permintaan agregat, rendahnya investasi manusia, instabilitas politik, dan dominasi rent-seeking. Artikel ini diterbitkan dalam *The Political Quarterly* dan memiliki DOI 10.1111/1467-923X.12237. ([Wiley Online Library](#))

Bagi Stiglitz, kapitalisme kontemporer semakin sering menyimpang dari kapitalisme kompetitif menuju kapitalisme rente. Dalam kapitalisme kompetitif, keuntungan diperoleh karena inovasi, efisiensi, kualitas, dan kemampuan menciptakan nilai. Dalam kapitalisme rente, keuntungan diperoleh karena kekuasaan pasar, hak istimewa regulasi, lobi politik, monopoli digital, perlindungan paten berlebihan, spekulasi keuangan, atau penguasaan aset strategis. Perbedaan ini sangat penting karena keduanya menghasilkan konsekuensi sosial yang berbeda. Keuntungan inovatif dapat memperbesar kesejahteraan bersama. Keuntungan rente sering hanya memindahkan kekayaan dari banyak orang kepada sedikit orang.

Stiglitz juga menekankan hubungan antara ketimpangan ekonomi dan ketimpangan politik. Ketika kekayaan terkonsentrasi, kelompok kaya memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan publik, membiayai kampanye politik, mengarahkan opini publik, dan membentuk regulasi yang menguntungkan mereka. Akibatnya, demokrasi dapat berubah menjadi plutokrasi terselubung. Hukum tetap ada, pemilu tetap berlangsung, tetapi arah kebijakan semakin mencerminkan kepentingan pemilik modal besar.

Mekanisme ini menciptakan lingkaran setan. Ketimpangan ekonomi menghasilkan ketimpangan politik. Ketimpangan politik menghasilkan aturan yang memperkuat ketimpangan ekonomi. Inilah yang membuat ketimpangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan amal, filantropi, atau program bantuan sosial yang bersifat tambal sulam. Ketimpangan harus diatasi dengan reformasi struktural terhadap aturan ekonomi.

Dalam konteks Stiglitz, tuntutan keadilan memiliki beberapa dimensi. Pertama, keadilan kesempatan. Setiap warga harus memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, nutrisi, internet, perumahan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas. Kedua, keadilan pasar. Pasar harus diatur agar kompetitif, tidak dikuasai monopoli, dan tidak memindahkan risiko kepada pihak lemah. Ketiga, keadilan fiskal. Pajak harus progresif, penghindaran pajak harus dibatasi, dan belanja publik harus diarahkan pada investasi sosial. Keempat, keadilan demokratis. Uang tidak boleh membeli kebijakan publik.

Pandangan Stiglitz juga relevan untuk ekonomi digital. Banyak perusahaan digital memperoleh kekuatan pasar melalui data, jaringan pengguna, algoritma, dan skala global. Setelah mencapai posisi dominan, mereka dapat menentukan harga, mengontrol akses, memengaruhi perilaku konsumen, dan mengakumulasi keuntungan luar biasa. Dalam situasi ini, pasar tidak otomatis kompetitif. Justru semakin besar platform, semakin sulit pesaing baru masuk. Oleh karena itu, keadilan kapitalisme digital menuntut regulasi antimonopoli, tata kelola data, perlindungan pekerja gig, transparansi algoritma, dan redistribusi hasil produktivitas digital.

Bagi Indonesia, pelajaran Stiglitz sangat penting. Ketimpangan tidak hanya muncul karena perbedaan kerja keras, tetapi karena perbedaan akses terhadap tanah, modal, pendidikan bermutu, jaringan politik, teknologi, dan perlindungan hukum. Jika ekonomi tumbuh tetapi struktur kesempatan tetap timpang, maka pertumbuhan akan mudah berubah menjadi akumulasi di puncak piramida. Dengan demikian, agenda pembangunan nasional harus bertanya: siapa memperoleh nilai tambah

dari hilirisasi? Siapa menguasai data digital? Siapa memperoleh akses pembiayaan? Siapa menanggung biaya ekologis? Siapa menikmati insentif negara?

4. Karl Polanyi: Pasar yang Tercerabut dan Gerakan Balik Masyarakat

Karl Polanyi memberikan kerangka historis-sosiologis yang sangat kuat untuk memahami krisis kapitalisme. Dalam *The Great Transformation*, ia menolak pandangan bahwa ekonomi pasar merupakan bentuk alami dari organisasi sosial manusia. Menurut Polanyi, dalam banyak masyarakat pra-modern, aktivitas ekonomi tertanam dalam hubungan sosial, budaya, agama, kekerabatan, dan politik. Pertukaran ekonomi tidak berdiri sebagai sistem otonom, melainkan berada dalam kerangka kewajiban sosial dan moral.

Transformasi besar terjadi ketika ekonomi pasar modern berusaha membalik hubungan tersebut. Bukan lagi ekonomi yang tertanam dalam masyarakat, melainkan masyarakat yang dipaksa tertanam dalam ekonomi pasar. Inilah yang disebut proses disembedding, yakni pelepasan ekonomi dari kontrol sosial. Pasar tidak lagi menjadi alat masyarakat, tetapi masyarakat menjadi alat pasar.

Konsep paling terkenal dari Polanyi adalah "komoditas fiktif": tenaga kerja, tanah, dan uang. Ketiganya disebut fiktif bukan karena tidak diperdagangkan, melainkan karena tidak diproduksi untuk dijual seperti barang biasa. Tenaga kerja adalah manusia yang hidup, berkeluarga, memiliki martabat, kesehatan, dan identitas sosial. Tanah adalah alam, ruang hidup, ekosistem, dan basis keberlanjutan. Uang adalah institusi sosial-politik yang menjadi sarana stabilitas ekonomi. Ketika ketiganya diperlakukan murni sebagai komoditas, maka masyarakat mengalami kerusakan.

Jika tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas biasa, maka manusia dinilai semata-mata dari produktivitas pasar. Mereka yang tidak sesuai

kebutuhan pasar dianggap “tidak efisien”, “tidak kompetitif”, atau “redundan”. Jika tanah diperlakukan sebagai komoditas biasa, maka hutan, air, mineral, dan ruang hidup dapat dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial. Jika uang diperlakukan sebagai komoditas biasa, maka sistem keuangan dapat menjadi arena spekulasi yang mengguncang kehidupan masyarakat luas.

Polanyi menyebut respons masyarakat terhadap ekspansi pasar sebagai double movement. Di satu sisi, ada gerakan untuk memperluas pasar, liberalisasi, privatisasi, deregulasi, dan komodifikasi. Di sisi lain, ada gerakan masyarakat untuk melindungi diri melalui regulasi tenaga kerja, jaminan sosial, perlindungan lingkungan, kebijakan pangan, kontrol keuangan, serikat pekerja, koperasi, dan kebijakan publik. Fred Block menunjukkan bahwa *The Great Transformation* menjadi karya sentral dalam sosiologi ekonomi, meskipun mengandung kompleksitas dan ketegangan teoritis dalam evolusi pemikiran Polanyi. Artikel Block tentang proses penulisan karya Polanyi memiliki DOI 10.1023/A:1024420102334. ([Springer Link](#))

Gagasan Polanyi sangat relevan untuk memahami gejolak kontemporer. Globalisasi neoliberal mendorong pembukaan pasar, fleksibilisasi tenaga kerja, deregulasi keuangan, dan privatisasi layanan publik. Namun, ketika masyarakat merasakan ketidakamanan kerja, hilangnya komunitas lokal, mahalnya layanan dasar, dan kerusakan lingkungan, muncul gerakan balik: protes sosial, nasionalisme ekonomi, populisme, tuntutan upah layak, tuntutan perlindungan sosial, gerakan iklim, serta kritik terhadap kekuasaan korporasi global.

Polanyi membantu kita melihat bahwa masyarakat tidak dapat hidup lama di bawah tekanan pasar total. Jika semua nilai diterjemahkan ke dalam harga, maka pendidikan menjadi investasi individual semata, kesehatan menjadi komoditas, alam menjadi aset ekstraktif, pekerjaan menjadi biaya produksi, dan warga negara berubah menjadi konsumen. Akibatnya, ikatan sosial melemah. Manusia merasa tidak lagi dilindungi oleh komunitas, negara, atau moralitas publik.

Dalam konteks kapitalisme masa depan, Polanyi mengajukan pesan mendasar: ekonomi harus kembali ditanamkan dalam masyarakat. Re-embedding bukan berarti menolak pasar, melainkan menempatkan pasar dalam batas-batas sosial, moral, ekologis, dan demokratis. Pasar harus melayani masyarakat, bukan masyarakat melayani pasar. Pertumbuhan harus tunduk pada martabat manusia dan keberlanjutan alam.

Konteks Indonesia memperlihatkan relevansi Polanyi dengan jelas. Ketika tanah adat, hutan, pesisir, dan lahan pertanian dikonversi menjadi komoditas investasi tanpa perlindungan sosial-ekologis yang memadai, konflik agraria muncul. Ketika tenaga kerja diperlakukan semata sebagai biaya, pekerja informal dan pekerja platform menghadapi kerentanan. Ketika uang dan kredit mengalir lebih mudah ke spekulasi aset daripada ekonomi produktif, ketimpangan kekayaan melebar. Polanyi membantu kita memahami bahwa pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari investasi masuk, tetapi juga dari apakah kehidupan sosial dan ekologis masyarakat tetap terlindungi.

5. Mariana Mazzucato: Negara Kewirausahaan, Nilai Publik, dan Inovasi Berbasis Misi

Mariana Mazzucato menawarkan perspektif yang sangat penting bagi pembaruan kapitalisme. Jika Stiglitz menekankan aturan yang adil dan Polanyi menekankan penanaman kembali ekonomi ke dalam masyarakat, Mazzucato menekankan penciptaan nilai publik melalui negara yang aktif, cerdas, dan berani mengambil risiko.

Kritik utama Mazzucato diarahkan pada mitos bahwa inovasi besar selalu lahir dari sektor swasta, sementara negara hanya berperan sebagai regulator, penyedia infrastruktur dasar, atau penyelamat ketika pasar gagal. Dalam *The Entrepreneurial State*, Mazzucato menunjukkan bahwa banyak teknologi besar yang mendasari ekonomi modern lahir dari investasi publik jangka panjang, terutama pada tahap awal yang penuh risiko. Internet,

GPS, teknologi layar sentuh, farmasi, energi bersih, dan berbagai inovasi strategis tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil kewirausahaan privat.

Namun, persoalannya bukan hanya mengakui peran negara. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil dari investasi publik dibagi. Jika negara menanggung risiko awal, tetapi keuntungan akhirnya diprivatisasi sepenuhnya oleh korporasi, maka terjadi ketidakadilan struktural: risiko disosialisasikan, imbal hasil diprivatisasi. Mazzucato menuntut desain kebijakan yang memastikan pembagian hasil secara lebih adil, misalnya melalui ekuitas publik, royalti, lisensi yang adil, persyaratan harga, reinvestasi keuntungan, atau kewajiban kontribusi terhadap tujuan sosial.

Dalam artikel *Challenge-Driven Innovation Policy*, Mazzucato, Kattel, dan Ryan-Collins mengusulkan kebijakan inovasi yang berorientasi pada tantangan besar masyarakat, seperti perubahan iklim, kesehatan publik, mobilitas berkelanjutan, dan ketahanan pangan. Artikel tersebut diterbitkan dalam *Journal of Industry, Competition and Trade* dan memiliki DOI 10.1007/s10842-019-00329-w. ([Springer Link](#))

Konsep mission-oriented innovation policy sangat penting. Misi bukan sekadar target administratif, melainkan arah kolektif yang menggerakkan investasi lintas sektor. Misalnya, misi "kota bebas karbon", "sistem pangan sehat", "energi bersih terjangkau", atau "kesehatan preventif berbasis data" dapat mengarahkan riset, industri, pendidikan, pembiayaan, dan regulasi menuju tujuan bersama. Misi berbeda dari program biasa karena bersifat lintas sektor, terukur, berorientasi hasil, dan mendorong eksperimen.

Mazzucato juga mengkritik teori nilai dalam ekonomi arus utama. Dalam *The Value of Everything*, ia membedakan value creation dan value extraction. Tidak semua aktivitas yang menghasilkan keuntungan pasar benar-benar menciptakan nilai sosial. Sebagian aktivitas hanya mengekstraksi nilai dari sistem: spekulasi finansial, monopoli paten, pembelian kembali saham berlebihan, penghindaran pajak, atau bisnis yang merusak lingkungan tetapi tidak membayar biaya ekologis. Sebaliknya, banyak aktivitas yang menciptakan nilai sosial—pendidikan,

perawatan, riset dasar, kesehatan publik, konservasi lingkungan—sering kurang dihargai oleh pasar.

Di sinilah Mazzucato memperluas perdebatan keadilan. Keadilan bukan hanya membagi ulang hasil setelah pasar bekerja. Keadilan harus masuk sejak awal dalam proses penciptaan nilai. Siapa menentukan arah inovasi? Siapa menanggung risiko? Siapa memiliki data? Siapa memperoleh keuntungan? Siapa menanggung eksternalitas? Siapa ikut memutuskan misi pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kapitalisme dari sekadar sistem harga menuju sistem nilai publik.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Mazzucato sangat relevan untuk hilirisasi, transisi energi, digitalisasi, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Jika negara memberikan insentif besar untuk industri nikel, kendaraan listrik, energi terbarukan, atau digitalisasi layanan publik, maka negara harus memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya mengalir kepada investor besar. Harus ada transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, standar lingkungan, keterlibatan UMKM, perlindungan pekerja, pembagian nilai tambah daerah, dan akuntabilitas publik. Tanpa itu, kebijakan industri dapat berubah menjadi subsidi bagi kapitalisme ekstraktif baru.

6. Titik Temu Stiglitz, Polanyi, dan Mazzucato

Ketiga pemikir ini berasal dari tradisi yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan fundamental. Mereka menolak fundamentalisme pasar. Mereka juga menolak pandangan bahwa negara selalu menjadi pengganggu ekonomi. Bagi mereka, negara dan institusi sosial bukan musuh pasar, melainkan prasyarat agar pasar dapat bekerja secara produktif dan adil.

Stiglitz melihat masalah kapitalisme dari sisi aturan dan ketimpangan. Polanyi melihatnya dari sisi ketercerabutan sosial. Mazzucato melihatnya dari sisi penciptaan nilai dan arah inovasi. Jika digabungkan, ketiganya membentuk kerangka yang sangat kuat:

Pertama, kapitalisme harus diatur ulang agar tidak menjadi mesin ketimpangan. Ini adalah pelajaran Stiglitz. Kedua, kapitalisme harus ditanamkan kembali dalam masyarakat dan alam. Ini adalah pelajaran Polanyi. Ketiga, kapitalisme harus diarahkan untuk menciptakan nilai publik melalui misi kolektif. Ini adalah pelajaran Mazzucato.

Ketiganya juga mengajarkan bahwa pasar bukan struktur netral. Pasar selalu dibentuk. Pertanyaannya bukan apakah negara harus ikut campur atau tidak, melainkan campur tangan seperti apa, untuk siapa, dengan akuntabilitas apa, dan berdasarkan nilai apa. Negara bisa membentuk pasar secara buruk, misalnya melalui korupsi, kronisme, proteksi rente, dan kebijakan yang hanya menguntungkan oligarki. Tetapi negara juga bisa membentuk pasar secara baik, misalnya melalui kebijakan kompetisi, investasi publik, riset, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan misi inovasi.

Titik temu lainnya adalah penolakan terhadap pemisahan tajam antara ekonomi dan moralitas. Dalam kapitalisme neoliberal, efisiensi sering dipisahkan dari keadilan. Pasar dianggap mengurus efisiensi, sementara negara mengurus distribusi setelahnya. Ketiga pemikir ini menolak pemisahan tersebut. Ketidakadilan dapat menciptakan inefisiensi. Komodifikasi berlebihan dapat merusak basis sosial produksi. Inovasi tanpa tujuan publik dapat memperkuat ekstraksi nilai.

Maka, keadilan bukan dekorasi moral di pinggir kapitalisme. Keadilan adalah syarat keberlanjutan kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme yang terlalu timpang akan kehilangan legitimasi. Kapitalisme yang merusak lingkungan akan kehilangan basis materialnya. Kapitalisme yang mengabaikan buruh akan kehilangan daya beli dan stabilitas sosial. Kapitalisme yang membiarkan monopoli akan kehilangan dinamika kompetitifnya. Kapitalisme yang memprivatisasi keuntungan tetapi mensosialisasikan risiko akan kehilangan kepercayaan publik.

7. Kapitalisme Ekstraktif: Gejala, Mekanisme, dan Bahayanya

Kapitalisme ekstraktif adalah bentuk kapitalisme yang lebih banyak mengambil nilai daripada menciptakan nilai. Ia tidak selalu tampil dalam bentuk eksploitasi kasar. Ia sering hadir secara legal, modern, dan bahkan tampak efisien. Namun, secara substantif ia memindahkan kekayaan dari masyarakat luas kepada kelompok kecil melalui kontrol atas aset, data, regulasi, keuangan, dan akses politik.

Salah satu bentuk kapitalisme ekstraktif adalah rent-seeking. Dalam ekonomi rente, keuntungan diperoleh bukan karena inovasi produktif, melainkan karena posisi istimewa. Misalnya, perusahaan memperoleh lisensi eksklusif, proteksi regulasi, akses murah terhadap sumber daya alam, subsidi tanpa kewajiban publik, atau kemampuan memengaruhi aturan pajak. Rent-seeking melemahkan produktivitas karena energi kewirausahaan dialihkan dari inovasi menuju lobi.

Bentuk kedua adalah financialization. Dalam ekonomi yang terlalu terfinansialisasi, sektor keuangan tidak lagi terutama melayani investasi produktif, melainkan menciptakan keuntungan dari spekulasi, leverage, dan instrumen kompleks. Ketika keuntungan finansial lebih besar daripada keuntungan produksi, perusahaan terdorong mengejar return jangka pendek, mengurangi investasi pekerja, melakukan buyback saham, dan memprioritaskan nilai pemegang saham di atas nilai sosial.

Bentuk ketiga adalah monopoli digital. Platform digital dapat menciptakan manfaat besar, tetapi juga dapat mengakumulasi kekuasaan melalui data, jaringan pengguna, dan algoritma. Setelah menjadi dominan, platform dapat mengatur akses pasar, menentukan komisi, mengendalikan visibilitas, dan menguasai data perilaku. Dalam hal ini, data masyarakat berubah menjadi aset privat yang menghasilkan keuntungan luar biasa, sementara masyarakat tidak selalu memperoleh imbal balik proporsional.

Bentuk keempat adalah ekstraktivisme ekologis. Sumber daya alam diambil dengan biaya lingkungan yang ditanggung masyarakat. Hutan rusak, air

tercemar, emisi meningkat, dan komunitas lokal kehilangan ruang hidup. Jika biaya ekologis tidak dimasukkan ke dalam harga, maka keuntungan perusahaan tampak besar, padahal sebagian merupakan subsidi tersembunyi dari alam dan masyarakat.

Bentuk kelima adalah komodifikasi layanan dasar. Ketika pendidikan, kesehatan, air, perumahan, dan transportasi publik diperlakukan semata sebagai komoditas, akses warga miskin dan kelas menengah rentan menjadi terbatas. Dalam kerangka Polanyi, ini adalah bentuk perluasan logika pasar ke wilayah yang seharusnya dilindungi sebagai hak sosial.

Bahaya terbesar kapitalisme ekstraktif adalah hilangnya legitimasi. Masyarakat masih dapat menerima ketimpangan tertentu jika dianggap adil, terbuka, dan berbasis prestasi. Namun, jika masyarakat merasa bahwa sistem dimanipulasi oleh elite, bahwa kerja keras tidak lagi menjamin mobilitas, dan bahwa keuntungan besar diperoleh dari akses politik atau monopoli, maka kepercayaan runtuh. Ketika kepercayaan runtuh, demokrasi menjadi rentan terhadap populisme, polarisasi, dan otoritarianisme.

8. Keadilan sebagai Syarat Produktivitas, Bukan Hambatan Pertumbuhan

Salah satu argumen paling penting dari Stiglitz adalah bahwa keadilan dan pertumbuhan tidak harus dipertentangkan. Dalam banyak kebijakan lama, redistribusi dianggap mengganggu insentif, sementara ketimpangan dianggap harga yang harus dibayar demi pertumbuhan. Namun, penelitian ekonomi modern menunjukkan bahwa ketimpangan ekstrem dapat melemahkan pertumbuhan. IMF melalui Ostry, Berg, dan Tsangarides menyimpulkan bahwa ketimpangan yang lebih rendah berkorelasi dengan pertumbuhan yang lebih tahan lama, dan redistribusi moderat tidak selalu merugikan pertumbuhan. Laporan IMF tersebut mencantumkan DOI 10.5089/9781484352076.006. ([IMF](#))

Keadilan dapat memperkuat produktivitas melalui beberapa jalur. Pertama, investasi manusia. Ketika pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan konektivitas digital tersedia luas, lebih banyak warga dapat berkontribusi secara produktif. Kedua, permintaan agregat. Distribusi pendapatan yang lebih merata memperkuat daya beli masyarakat luas. Ketiga, stabilitas sosial. Masyarakat yang lebih adil cenderung memiliki konflik sosial lebih rendah dan kepercayaan lebih tinggi. Keempat, inovasi inklusif. Jika akses pembiayaan dan pengetahuan tidak hanya dimiliki elite, inovasi dapat muncul dari lebih banyak aktor. Kelima, legitimasi institusi. Kebijakan publik lebih mudah dijalankan jika masyarakat percaya bahwa sistem bekerja untuk kepentingan bersama.

Keadilan juga penting dalam konteks teknologi. Revolusi AI, otomasi, dan digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi manfaatnya tidak otomatis tersebar merata. Jika teknologi menggantikan pekerjaan rutin, memperbesar keuntungan pemilik modal, dan melemahkan posisi tawar pekerja, maka produktivitas dapat naik bersamaan dengan ketimpangan. Karena itu, kebijakan teknologi harus berorientasi pada human-centered productivity: teknologi harus meningkatkan kapasitas manusia, bukan sekadar mengganti manusia.

Dalam perspektif Mazzucato, inovasi harus diarahkan oleh misi publik. Negara tidak cukup hanya memberi insentif pajak dan berharap pasar menciptakan hasil baik. Negara harus menetapkan arah: energi bersih, pangan sehat, kesehatan preventif, pendidikan digital inklusif, industri hijau, dan transportasi rendah karbon. Namun, arah tersebut harus disertai syarat keadilan: pekerjaan layak, transfer teknologi, keterbukaan data, harga terjangkau, dan pembagian keuntungan.

Dalam perspektif Polanyi, keadilan berarti membatasi komodifikasi. Tidak semua hal boleh diserahkan kepada mekanisme harga. Ada barang dan layanan yang harus dijaga sebagai hak sosial atau common goods. Air bersih, udara sehat, pendidikan dasar, kesehatan publik, keamanan pangan, dan perlindungan sosial tidak boleh sepenuhnya bergantung pada daya

beli individu. Jika semua diserahkan kepada pasar, maka masyarakat menjadi rapuh.

9. Kapitalisme Digital: Antara Inovasi dan Konsentrasi Kekuasaan

Kapitalisme digital merupakan arena penting bagi masa depan kapitalisme. Teknologi digital membawa peluang besar: efisiensi transaksi, perluasan akses informasi, pembelajaran jarak jauh, telemedicine, e-commerce, kecerdasan buatan, big data, dan produktivitas baru. Namun, teknologi digital juga dapat memperkuat konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Dalam ekonomi platform, pemenang sering mengambil sebagian besar pasar. Network effects membuat platform yang sudah besar menjadi semakin besar karena pengguna ingin berada di tempat yang sudah banyak penggunanya. Data advantages membuat perusahaan dominan semakin unggul karena semakin banyak data menghasilkan algoritma lebih baik. Switching costs membuat pengguna sulit pindah. Akibatnya, pasar digital cenderung menuju konsentrasi.

Dari perspektif Stiglitz, ini adalah persoalan market power. Ketika kekuatan pasar meningkat, perusahaan dapat menaikkan harga, menekan pemasok, menurunkan upah relatif, dan memperoleh keuntungan monopoli. OECD pernah mengkaji bahwa market power dapat menjadi biaya tersembunyi bagi ketimpangan karena keuntungan dari kekuatan pasar cenderung mengalir kepada pemilik modal yang berada di kelompok kaya. ([OECD](#))

Dari perspektif Polanyi, data dan perhatian manusia dapat menjadi "komoditas fiktif" baru. Data pribadi bukan barang yang diproduksi secara sadar untuk dijual seperti komoditas biasa. Data lahir dari kehidupan sosial manusia: percakapan, lokasi, preferensi, kesehatan, pendidikan, relasi, dan perilaku. Ketika data dikomodifikasi tanpa kontrol publik, kehidupan sosial menjadi bahan mentah kapitalisme digital. Perhatian manusia juga diperdagangkan melalui ekonomi iklan, sehingga desain platform sering

diarahkan untuk memaksimalkan keterlibatan, bukan kesejahteraan mental atau kualitas demokrasi.

Dari perspektif Mazzucato, pertanyaan kuncinya adalah siapa menciptakan dan siapa mengambil nilai digital. Banyak teknologi digital dibangun di atas investasi publik: internet, riset komputer, satelit, pendidikan STEM, dan infrastruktur komunikasi. Namun, keuntungan akhirnya sering terkonsentrasi pada perusahaan privat global. Maka, negara harus merancang tata kelola data, pajak digital, persyaratan interoperabilitas, standar etika AI, dan investasi publik dalam infrastruktur digital terbuka.

Indonesia menghadapi peluang dan risiko besar dalam kapitalisme digital. Ekonomi digital dapat memperluas pasar UMKM, memperbaiki layanan publik, meningkatkan literasi, dan membuka lapangan kerja baru. Namun, tanpa regulasi yang tepat, UMKM dapat menjadi tergantung pada platform, pekerja gig dapat kehilangan perlindungan, data warga dapat diekstraksi, dan nilai tambah digital dapat mengalir ke pusat-pusat modal global. Maka, masa depan digital Indonesia harus dibangun sebagai digital capitalism with public purpose, bukan sekadar perluasan pasar aplikasi.

10. Kapitalisme Hijau: Transisi Energi atau Ekstraktivisme Baru?

Transisi energi dan ekonomi hijau sering dipandang sebagai jawaban atas krisis iklim. Namun, pertanyaannya adalah: apakah kapitalisme hijau benar-benar mengubah struktur ekonomi, atau hanya mengganti objek ekstraksi? Jika kendaraan listrik, baterai, nikel, energi terbarukan, dan pasar karbon hanya menjadi arena akumulasi baru tanpa keadilan sosial-ekologis, maka kapitalisme hijau dapat berubah menjadi ekstraktivisme hijau.

Mazzucato sangat relevan di sini. Ia menekankan bahwa negara harus membentuk pasar hijau, bukan hanya memberi subsidi. Dalam tulisan tentang *The Green Entrepreneurial State*, ia membahas peran negara dalam mengambil risiko dan mendorong teknologi hijau. Versi bab buku tersebut

memiliki DOI 10.4324/9781315747378-9, sementara versi working paper juga beredar dengan DOI SSRN 10.2139/ssrn.2744602. ([Taylor & Francis](#))

Namun, investasi hijau harus disertai conditionalities. Perusahaan yang menerima dukungan publik untuk energi bersih harus memenuhi syarat: pengurangan emisi nyata, standar pekerja layak, keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, transparansi rantai pasok, dan pembagian manfaat dengan daerah. Jika tidak, subsidi hijau hanya menjadi bentuk baru privatisasi keuntungan.

Polanyi mengingatkan bahwa tanah dan alam bukan komoditas biasa. Dalam konteks transisi energi, mineral kritis seperti nikel, litium, kobalt, dan tembaga menjadi pusat ekonomi baru. Namun, eksploitasi mineral tanpa perlindungan lingkungan dapat merusak ekosistem dan komunitas lokal. Maka, transisi energi harus dilihat bukan hanya sebagai proyek industri, tetapi sebagai proyek keadilan ekologis.

Stiglitz menambahkan bahwa kebijakan hijau harus memperhatikan distribusi. Pajak karbon, misalnya, dapat efektif secara ekonomi tetapi regresif jika tidak disertai kompensasi kepada rumah tangga miskin. Subsidi kendaraan listrik dapat menguntungkan kelas menengah atas jika tidak diimbangi dengan investasi transportasi publik. Oleh karena itu, kebijakan iklim harus didesain sebagai just transition.

Bagi Indonesia, isu ini sangat nyata. Hilirisasi nikel dapat menjadi peluang strategis, tetapi juga dapat memperkuat ketergantungan pada komoditas jika tidak disertai industrial upgrading, riset domestik, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas SDM. Sawit dapat menjadi sumber devisa, tetapi harus dikelola dengan standar keberlanjutan dan perlindungan petani kecil. Batu bara masih menjadi sumber energi dan penerimaan, tetapi transisi menuju energi bersih memerlukan strategi sosial bagi pekerja dan daerah penghasil.

Kapitalisme hijau masa depan harus menjawab tiga pertanyaan: apakah ia menurunkan emisi? apakah ia memperbaiki distribusi? apakah ia

memperkuat kapasitas produktif nasional? Jika hanya menjawab pertanyaan pertama secara kosmetik, maka ia belum cukup. Jika menjawab ketiganya, maka ia dapat menjadi jalan menuju kapitalisme berkeadilan ekologis.

11. Negara: Dari Penjaga Pasar Menjadi Pembentuk Masa Depan

Perdebatan tentang kapitalisme sering terjebak dalam dikotomi negara versus pasar. Negara dianggap lamban, pasar dianggap efisien. Negara dianggap politis, pasar dianggap netral. Namun, Stiglitz, Polanyi, dan Mazzucato menunjukkan bahwa dikotomi ini keliru. Pasar selalu membutuhkan negara, dan negara selalu membentuk pasar.

Masalahnya bukan negara besar atau kecil, tetapi negara seperti apa. Negara yang lemah dapat dikooptasi oleh oligarki. Negara yang kuat tetapi tidak akuntabel dapat menjadi otoriter dan korup. Negara yang cerdas, demokratis, dan berkapasitas dapat menjadi pengarah pembangunan.

Stiglitz menekankan negara sebagai pembuat aturan. Negara harus menjamin kompetisi, mengatur sektor keuangan, melindungi konsumen, menyediakan barang publik, dan melakukan redistribusi. Polanyi menekankan negara sebagai pelindung masyarakat dari kerusakan pasar. Negara harus menjaga tenaga kerja, tanah, uang, dan layanan dasar agar tidak sepenuhnya tunduk pada logika komoditas. Mazzucato menekankan negara sebagai pencipta nilai dan pembentuk pasar. Negara harus berani menetapkan misi, membiayai riset, menggerakkan investasi, dan membangun kapasitas publik.

Namun, gagasan negara aktif selalu menghadapi risiko. Negara dapat gagal memilih sektor. Negara dapat menjadi alat rente. Negara dapat memboroskan anggaran. Negara dapat menciptakan proyek mercusuar tanpa hasil. Karena itu, negara kewirausahaan ala Mazzucato tidak boleh dipahami sebagai negara yang sekadar menggelontorkan uang. Ia harus dipahami sebagai negara yang memiliki kapasitas analitis, disiplin evaluasi,

kemampuan koordinasi, keberanian eksperimen, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas.

Dalam konteks Indonesia, negara aktif sangat diperlukan karena transformasi struktural tidak terjadi otomatis. Pasar tidak akan sendirinya membangun industri bernilai tambah tinggi, riset mendalam, pendidikan vokasi bermutu, infrastruktur daerah tertinggal, atau energi bersih. Namun, negara aktif harus berbeda dari negara rente. Setiap insentif industri harus memiliki indikator kinerja publik. Setiap kemitraan publik-swasta harus membagi risiko dan hasil secara adil. Setiap proyek strategis harus dievaluasi dari manfaat sosial, bukan hanya nilai investasi.

12. Demokrasi Ekonomi dan Pembaruan Kontrak Sosial

Masa depan kapitalisme tidak dapat hanya dibahas dalam bahasa teknokratis. Ia juga harus dibahas sebagai persoalan demokrasi. Siapa menentukan arah pembangunan? Siapa memiliki suara dalam kebijakan industri? Siapa mengontrol data? Siapa menentukan prioritas inovasi? Siapa memperoleh manfaat dari sumber daya alam?

Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi mudah menjadi dangkal. Warga dapat memilih pemimpin, tetapi jika struktur ekonomi dikuasai oleh segelintir aktor besar, ruang kebijakan publik menjadi sempit. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang tidak demokratis dapat kehilangan legitimasi walaupun tampak efisien.

Demokrasi ekonomi tidak harus berarti penghapusan kepemilikan privat. Ia berarti perluasan partisipasi, akuntabilitas, dan distribusi kekuasaan ekonomi. Bentuknya dapat berupa koperasi, kepemilikan pekerja, serikat buruh kuat, dewan upah, partisipasi komunitas dalam proyek sumber daya alam, anggaran partisipatif, tata kelola data publik, dan mekanisme konsultasi dalam kebijakan industri.

Stiglitz akan melihat demokrasi ekonomi sebagai cara mengurangi pengaruh uang besar dalam politik. Polanyi akan melihatnya sebagai cara menanamkan ekonomi kembali dalam masyarakat. Mazzucato akan melihatnya sebagai cara memastikan misi publik benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, bukan hanya agenda elite teknokratik atau korporasi besar.

Kontrak sosial baru harus memuat sekurang-kurangnya lima unsur. Pertama, hak atas kapasitas dasar: pendidikan, kesehatan, nutrisi, perumahan layak, dan konektivitas digital. Kedua, hak atas pekerjaan bermartabat: upah layak, perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Ketiga, hak atas lingkungan hidup: udara bersih, air bersih, tanah produktif, dan perlindungan dari bencana ekologis. Keempat, hak atas partisipasi ekonomi: akses kredit, pasar, teknologi, dan data. Kelima, hak atas perlindungan dari kekuasaan ekonomi berlebihan: antimonopoli, pajak adil, dan transparansi korporasi.

Kapitalisme masa depan hanya akan bertahan jika ia mampu membangun kontrak sosial tersebut. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi akan terus dibayangi oleh krisis legitimasi.

13. Implikasi bagi Indonesia: Dari Pertumbuhan Ekstraktif ke Transformasi Berkeadilan

Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun kapitalisme yang lebih adil dan produktif. Sumber daya alam melimpah, pasar domestik besar, bonus demografi masih tersedia, ekonomi digital tumbuh, dan posisi geopolitik strategis. Namun, peluang ini dapat berubah menjadi jebakan jika struktur pembangunan tetap ekstraktif.

Pertama, hilirisasi harus menjadi proyek pembelajaran nasional, bukan sekadar ekspor produk setengah jadi. Jika nikel hanya diolah menjadi produk bernilai tambah rendah dengan teknologi, modal, dan pasar dikuasai pihak luar, maka hilirisasi tidak cukup. Hilirisasi harus dikaitkan

dengan riset, universitas, politeknik, engineering capability, standardisasi lingkungan, dan pengembangan perusahaan nasional.

Kedua, sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip Polanyian: tanah dan alam bukan komoditas biasa. Pembangunan perkebunan, tambang, energi, dan infrastruktur harus memperhitungkan hak masyarakat lokal, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan pangan. Konflik agraria dan kerusakan lingkungan adalah sinyal bahwa ekonomi tidak tertanam secara sehat dalam masyarakat.

Ketiga, kebijakan digital harus belajar dari Stiglitz. Negara harus mencegah monopoli platform, melindungi data warga, memperkuat UMKM, dan memberi perlindungan pekerja gig. Ekonomi digital tidak boleh hanya menjadi pasar baru bagi kapital besar. Ia harus menjadi infrastruktur produktivitas inklusif.

Keempat, Indonesia memerlukan agenda Mazzucato: misi pembangunan nasional yang jelas. Misalnya, misi "Indonesia sehat preventif", "desa digital produktif", "pangan bergizi berkelanjutan", "energi bersih terjangkau", "industri maritim hijau", dan "pendidikan AI untuk semua". Misi seperti ini dapat menghubungkan kementerian, daerah, universitas, BUMN, swasta, koperasi, dan masyarakat sipil.

Kelima, negara harus memperkuat kapasitas fiskal dan tata kelola. Tanpa pajak yang adil, negara tidak memiliki sumber daya untuk investasi publik. Tanpa tata kelola yang bersih, negara aktif dapat berubah menjadi negara rente. Oleh karena itu, pembaruan kapitalisme Indonesia membutuhkan reformasi pajak, pengadaan publik transparan, pengawasan konflik kepentingan, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.

Keenam, pendidikan menjadi fondasi keadilan kapitalisme masa depan. Dalam ekonomi berbasis AI dan pengetahuan, ketimpangan pendidikan akan menjadi ketimpangan pendapatan, ketimpangan politik, dan ketimpangan martabat. Indonesia harus memperluas akses pendidikan

bermutu, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, etika teknologi, dan pembelajaran sepanjang hayat.

14. Menuju Kapitalisme Berkeadilan: Kerangka Integratif

Dari Stiglitz, Polanyi, dan Mazzucato, kita dapat merumuskan kerangka kapitalisme berkeadilan yang terdiri atas tujuh prinsip.

Pertama, pasar harus kompetitif dan anti-rente. Monopoli, kartel, lobi rente, dan penguasaan regulasi harus dibatasi. Keuntungan harus lebih banyak berasal dari inovasi produktif, bukan akses istimewa.

Kedua, ekonomi harus tertanam dalam masyarakat. Tenaga kerja, alam, uang, data, dan layanan dasar tidak boleh diperlakukan semata sebagai komoditas. Harus ada batas sosial dan ekologis terhadap pasar.

Ketiga, negara harus membentuk pasar untuk tujuan publik. Negara tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran setelah pasar gagal. Negara harus menetapkan misi, membangun kapasitas, dan mengarahkan investasi.

Keempat, risiko dan imbal hasil harus dibagi secara adil. Jika publik menanggung risiko melalui subsidi, riset, infrastruktur, atau bailout, maka publik harus memperoleh imbal balik melalui harga adil, kepemilikan, royalti, pajak, atau manfaat sosial.

Kelima, inovasi harus dinilai dari nilai publik. Teknologi tidak boleh hanya diukur dari valuasi perusahaan, tetapi dari dampaknya pada pekerjaan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan demokrasi.

Keenam, pertumbuhan harus inklusif secara institusional. Redistribusi penting, tetapi tidak cukup. Keadilan harus dibangun dalam struktur awal: pendidikan, akses modal, kepemilikan aset, pasar kerja, data, dan kebijakan industri.

Ketujuh, demokrasi harus meluas ke ekonomi. Warga, pekerja, komunitas lokal, akademisi, dan pelaku usaha kecil harus memiliki suara dalam arah pembangunan.

Kerangka ini tidak anti-kapitalisme dalam arti menolak pasar, laba, perusahaan, atau kewirausahaan. Sebaliknya, ia berusaha menyelamatkan kapitalisme dari kecenderungan merusak dirinya sendiri. Kapitalisme yang membiarkan ketimpangan ekstrem akan kehilangan permintaan, stabilitas, dan legitimasi. Kapitalisme yang menghancurkan alam akan kehilangan basis material. Kapitalisme yang mengabaikan masyarakat akan menghadapi gerakan balik. Kapitalisme yang mengekstraksi nilai tanpa menciptakan nilai akan mandek.

15. Penutup: Masa Depan Kapitalisme sebagai Pilihan Moral-Politik

Masa depan kapitalisme bukan takdir. Ia adalah pilihan institusional, politik, dan moral. Kapitalisme dapat bergerak menuju bentuk yang lebih ekstraktif, oligarkis, digital-feodal, dan ekologis destruktif. Tetapi ia juga dapat direkonstruksi menjadi sistem yang lebih produktif, inklusif, demokratis, dan berorientasi nilai publik.

Stiglitz mengingatkan bahwa ketimpangan adalah pilihan. Jika aturan ekonomi dibuat untuk melayani kepentingan sempit, maka hasilnya adalah konsentrasi kekayaan dan pelemahan demokrasi. Polanyi mengingatkan bahwa pasar yang tercerabut akan memicu kerusakan sosial dan gerakan balik. Mazzucato mengingatkan bahwa negara dan masyarakat dapat membentuk pasar untuk misi publik, bukan hanya tunduk pada pasar.

Dengan mengintegrasikan ketiganya, tuntutan keadilan bukanlah beban tambahan bagi kapitalisme. Keadilan adalah syarat agar kapitalisme tetap hidup secara sah, stabil, dan produktif. Kapitalisme masa depan harus menjawab bukan hanya "berapa besar pertumbuhan?", tetapi juga "untuk siapa pertumbuhan?", "siapa menciptakan nilai?", "siapa mengambil nilai?",

"siapa menanggung risiko?", "siapa memiliki suara?", dan "apakah alam tetap lestari?"

Bagi Indonesia, pertanyaan ini sangat mendesak. Di tengah hilirisasi, transisi energi, digitalisasi, AI, perubahan demografi, dan tekanan geopolitik, Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Indonesia harus membangun sistem kapitalisme pembangunan yang berkeadilan: pasar yang kompetitif, negara yang berkapasitas, masyarakat yang terlindungi, alam yang dijaga, dan inovasi yang diarahkan pada kesejahteraan bersama.

Masa depan kapitalisme akan ditentukan oleh keberanian untuk menata ulang hubungan antara pasar, negara, masyarakat, dan alam. Dalam bahasa Stiglitz, aturan harus ditulis ulang. Dalam bahasa Polanyi, ekonomi harus ditanamkan kembali dalam masyarakat. Dalam bahasa Mazzucato, pasar harus dibentuk oleh misi publik. Di situlah keadilan bukan hanya menjadi cita-cita etis, tetapi menjadi fondasi peradaban ekonomi yang lebih manusiawi.

Glossarium

AI capitalism

Bentuk kapitalisme yang bertumpu pada kecerdasan buatan, data, algoritma, komputasi skala besar, dan platform digital sebagai sumber utama nilai ekonomi.

Antimonopoli

Kebijakan hukum dan ekonomi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pasar yang berlebihan, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik anti-kompetitif.

Capitalism with public purpose

Kapitalisme yang tidak hanya mengejar laba privat, tetapi diarahkan untuk

menciptakan nilai publik seperti kesehatan, pendidikan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Commodification / komodifikasi

Proses ketika sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai sosial, moral, ekologis, atau kultural diperlakukan sebagai barang dagangan pasar.

Double movement

Konsep Karl Polanyi tentang dua gerakan dalam kapitalisme: ekspansi pasar bebas dan gerakan balik masyarakat untuk melindungi diri dari dampak destruktif pasar.

Embedded economy

Ekonomi yang tertanam dalam norma sosial, institusi politik, nilai moral, dan relasi komunitas; bukan sistem yang berdiri sendiri di luar masyarakat.

Extractive capitalism / kapitalisme ekstraktif

Kapitalisme yang lebih banyak mengambil nilai melalui rente, monopoli, eksploitasi alam, dan kekuasaan politik daripada menciptakan nilai produktif baru.

Fictitious commodities / komoditas fiktif

Konsep Polanyi untuk tenaga kerja, tanah, dan uang yang diperlakukan sebagai komoditas pasar, padahal tidak diciptakan untuk dijual seperti barang biasa.

Financialization

Dominasi logika, aktor, dan instrumen keuangan dalam ekonomi, sehingga keuntungan sering lebih banyak berasal dari transaksi finansial daripada produksi riil.

Inclusive growth

Pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya tersebar luas, membuka kesempatan, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan.

Just transition

Transisi menuju ekonomi rendah karbon yang memperhatikan pekerja,

komunitas lokal, daerah penghasil, dan kelompok rentan agar tidak menjadi korban perubahan struktural.

Market shaping

Gagasan Mazzucato bahwa negara tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga membentuk arah pasar melalui kebijakan, investasi, dan misi publik.

Mission-oriented innovation policy

Kebijakan inovasi berbasis misi yang mengarahkan investasi, riset, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan tantangan besar masyarakat.

Public value / nilai publik

Nilai yang tidak hanya diukur dari harga pasar atau laba, tetapi dari manfaat sosial, ekologis, kesehatan, pendidikan, demokrasi, dan kesejahteraan kolektif.

Rent-seeking

Upaya memperoleh keuntungan bukan melalui penciptaan nilai produktif, melainkan melalui monopoli, lobi, hak istimewa regulasi, lisensi, atau akses politik.

Re-embedding

Proses menanamkan kembali ekonomi ke dalam masyarakat melalui regulasi, perlindungan sosial, institusi demokratis, dan batas ekologis.

State capacity

Kemampuan negara untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menegakkan kebijakan publik secara efektif, bersih, dan akuntabel.

Value creation

Penciptaan nilai nyata melalui inovasi, produksi, layanan, pengetahuan, perawatan, pendidikan, dan aktivitas yang memperbesar kesejahteraan.

Value extraction

Pengambilan nilai dari sistem ekonomi tanpa kontribusi produktif yang

sepadan, misalnya melalui rente, monopoli, spekulasi, atau penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

Format APA 7; DOI dicantumkan jika tersedia. Beberapa buku utama tidak memiliki DOI karena merupakan monograf.

Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). *Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity*. PublicAffairs. DOI tidak tersedia.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). Tasks, automation, and the rise in U.S. wage inequality. *Econometrica*, 90(5), 1973–2016. doi: 10.3982/ECTA19815

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Block, F. (2003). Karl Polanyi and the writing of *The Great Transformation*. *Theory and Society*, 32, 275–306. doi: 10.1023/A:1024420102334

Block, F., & Somers, M. R. (2014). *The power of market fundamentalism: Karl Polanyi's critique*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Ennis, S. F., Gonzaga, P., & Pike, C. (2017). Inequality: A hidden cost of market power. *OECD Competition Division*. doi: 10.2139/ssrn.2942791

Gemici, K. (2008). Karl Polanyi and the antinomies of embeddedness. *Socio-Economic Review*, 6(1), 5–33. doi: 10.1093/ser/mwl034

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. doi: 10.1086/228311

Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. *Soundings*, 49, 131–142. doi: 10.3898/136266211798411183

Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2015). The green entrepreneurial state. In I. Scoones, M. Leach, & P. Newell (Eds.), *The politics of green transformations* (pp. 134–152). Routledge. doi: 10.4324/9781315747378-9

Mazzucato, M. (2018a). *The value of everything: Making and taking in the global economy*. PublicAffairs. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2018b). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. doi: 10.1093/icc/dty034

Mazzucato, M. (2021). *Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism*. Harper Business. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M., Kattel, R., & Ryan-Collins, J. (2020). Challenge-driven innovation policy: Towards a new policy toolkit. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20(2), 421–437. doi: 10.1007/s10842-019-00329-w

Mazzucato, M., & Semieniuk, G. (2018). Financing renewable energy: Who is financing what and why it matters. *Technological Forecasting and Social Change*, 127, 8–22. doi: 10.1016/j.techfore.2017.05.021

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. DOI tidak tersedia.

Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. doi: 10.1257/aer.100.3.641

Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). Redistribution, inequality, and growth. *IMF Staff Discussion Note*, 14(2), 1–30. doi: 10.5089/9781484352076.006

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd Beacon Paperback ed.; J. E. Stiglitz, Foreword; F.

Block, Introduction). Beacon Press. Original work published 1944. DOI tidak tersedia.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. doi: 10.1057/s42214-018-0001-4

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf. DOI tidak tersedia.

Silver, B. J., & Arrighi, G. (2003). Polanyi's "double movement": The belle époques of British and U.S. hegemony compared. *Politics & Society*, 31(2), 325–355. doi: 10.1177/0032329203252274

Stiglitz, J. E. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, 92(3), 460–501. doi: 10.1257/00028280260136363

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E. (2015). *The great divide: Unequal societies and what we can do about them*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E. (2016). Inequality and economic growth. *The Political Quarterly*, 86(S1), 134–155. doi: 10.1111/1467-923X.12237

Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2010). *Mismeasuring our lives: Why GDP doesn't add up*. The New Press. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 24 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a3c7e57-42bc-83ec-b637-b98bfb664148>